YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER PEMBARUAN HUKUM DALAM SISTEM CIVIL LAW INDONESIA: KAJIAN PUSTAKA ATAS FUNGSI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

Gunawan Widjaja

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Cecep Suhardiman

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstract

This study discusses the role of jurisprudence as a source of legal reform in Indonesia's civil law system by examining the function of judicial discovery through a literature review. In practice, the limitations of written regulations often encourage judges to interpret and form new norms to fill gaps and adapt the law to societal developments. The process of legal discovery (rechtsvinding) produces decisions that not only resolve individual cases but also form jurisprudence that serves as a guideline for resolving similar cases in the future. This study emphasizes that jurisprudence plays a significant role as a driver of national legal reform, although it remains within the framework and supremacy of legislation. Therefore, synergy between judicial discovery and formal legislation is essential to achieve an adaptive, responsive, and just legal system in Indonesia.

Keywords: *jurisprudence, legal reform, civil law, judicial discovery, judges, Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum dalam sistem civil law Indonesia dengan mengkaji fungsi penemuan hukum oleh hakim melalui kajian pustaka. Dalam praktiknya, keterbatasan regulasi tertulis seringkali mendorong hakim untuk melakukan interpretasi serta membentuk norma baru guna mengisi kekosongan dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Proses penemuan hukum (rechtsvinding) menghasilkan putusan yang tidak hanya menyelesaikan kasus individual, namun juga membentuk yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara serupa di masa mendatang. Kajian ini menegaskan bahwa yurisprudensi berperan signifikan sebagai motor pembaruan hukum nasional, meskipun tetap dalam kerangka dan supremasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sinergi antara penemuan hukum oleh hakim dan legislasi formal sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan di Indonesia.

Kata kunci: yurisprudensi, pembaruan hukum, civil law, penemuan hukum, hakim, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia menganut sistem hukum civil law yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, undang-undang dikodifikasikan secara sistematis untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan tidak dapat mengatur secara lengkap seluruh situasi hukum yang muncul dalam kehidupan sosial, sehingga terdapat ruang bagi sumber hukum lain untuk melengkapi kekosongan tersebut. Salah satu sumber hukum yang mulai mendapat perhatian dalam sistem civil law Indonesia adalah yurisprudensi atau putusan hakim yang mempunyai fungsi sebagai sumber pembaruan hukum (Azmi, 2024).

Yurisprudensi dalam tradisi civil law memiliki karakter berbeda dengan sistem common law yang mengedepankan prinsip *stare decisis* atau doktrin preseden yang mengikat. Di Indonesia, meskipun yurisprudensi bukan sumber hukum utama, kehadirannya sangat penting sebagai pelengkap dan pengembangan hukum undang-undang. Yurisprudensi memberikan contoh konkret penerapan hukum dalam kasus-kasus nyata, sehingga berperan sebagai sarana penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara (Ramstedt, 2025).

Proses penemuan hukum oleh hakim dalam sistem civil law memungkinkan hakim untuk melakukan interpretasi dan konstruksi hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Fungsi ini menjadi kunci dalam mempertahankan relevansi hukum di tengah dinamika sosial dan perubahan Masyarakat (Putri, 2025). Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya mengisi kekosongan hukum tetapi juga berperan dalam pembaruan hukum yang adaptif dan responsif.

Peran yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum menjadi semakin signifikan mengingat keterbatasan hukum tertulis yang cenderung kaku dan lambat beradaptasi dengan perkembangan sosial. Hakim melalui putusan-putusan yang mereka buat, menghasilkan suatu bentuk hukum yang hidup dan berkembang, yang dapat menjadi acuan bagi hakim-hakim lain dalam sengketa serupa. Hal ini menciptakan mekanisme informal pembaruan hukum di luar proses legislasi formal (Hia, 2023). Namun, kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia belum lepas dari perdebatan. Secara normatif, Indonesia menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, dan yurisprudensi memiliki posisi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang bersifat *persuasive precedent*. Meski demikian, dalam praktik, terdapat kecenderungan yurisprudensi memiliki kekuatan mengikat di beberapa pengadilan, bahkan bisa menyingkirkan undang-undang yang dianggap kurang relevan (Selwas, 2020).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam posisi yurisprudensi di Indonesia. Pergeseran ini bukan tanpa konsekuensi, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila yurisprudensi yang diikuti oleh hakim berbeda-beda atau bertentangan dengan teks undang-undang. Oleh karenanya, kajian mendalam diperlukan untuk memahami implikasi yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum sekaligus menjaga keseimbangan dengan supremasi undang-undang (Sasmito, 2023).

Yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga kepastian dan keadilan hukum di masyarakat. Dengan putusan-putusan yurisprudensi, hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah hukum yang muncul, sehingga hukum tetap hidup dan berkembang sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks hukum pidana, misalnya, yurisprudensi dapat memberikan arah interpretasi yang lebih kontekstual terhadap pasal-pasal undang-undang yang bersifat umum, sehingga dapat mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan norma. Hal ini menegaskan pentingnya mekanisme penemuan hukum oleh hakim dalam sistem civil law Indonesia (Tarigan, 2024).

Namun demikian, penting untuk memerhatikan batas-batas penggunaan yurisprudensi. Dalam sistem civil law, hakim tidak diberi keleluasaan mutlak karena harus tunduk pada norma undang-undang, sehingga yurisprudensi sebagai sumber pembaruan tetap harus berada dalam

kerangka hukum tertulis. Kerangka ini menjaga agar pembaruan hukum melalui yurisprudensi tidak menyimpang dari prinsip dasar supremasi undang-undang (Darmawan & Wijaya, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam posisi dan fungsi yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum dalam sistem civil law Indonesia, khususnya melalui fungsi penemuan hukum oleh hakim. Penelitian ini berharap dapat memberi kontribusi akademik dalam memahami dinamika sumber hukum dan pembaruan hukum di Indonesia yang kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur serta sumber-sumber hukum yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan terkait tema yurisprudensi dan pembaruan hukum dalam sistem civil law Indonesia (Eliyah & Aslan, 2025). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang posisi dan fungsi yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum melalui analisis terhadap teori-teori hukum, pandangan para ahli, serta studi kasus putusan-putusan penting yang berperan dalam pengembangan hukum oleh hakim (Petticrew & Roberts, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Yurisprudensi sebagai Sumber Pembaruan Hukum dalam Sistem Civil Law Indonesia

Yurisprudensi, atau putusan-putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terus diikuti, memegang peranan penting dalam dinamika sistem hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem civil law yang secara formal menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, realitas perkembangan masyarakat kerap menuntut adanya inovasi dan pembaruan hukum yang melampaui keterbatasan teks undang-undang (Tarigan, 2024).

Dalam praktiknya, yurisprudensi sering digunakan oleh hakim sebagai pedoman ketika menghadapi perkara yang belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan. Proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim melalui putusan-putusan tersebut berperan mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan hukum positif dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Darmawan & Wijaya, 2024).

Peran yurisprudensi makin menonjol di tengah kompleksitas masalah-masalah hukum modern yang tidak selalu dapat dijawab dengan aturan normatif yang kaku. Banyak kasus konkret yang memaksa hakim untuk berinovasi dan memberikan tafsir hukum baru, sehingga tercipta preseden yang kemudian menjadi acuan bagi penyelesaian perkara-perkara serupa di masa depan. Walaupun secara teoritis civil law menekankan supremasi undang-undang, perkembangan sosial dan hukum di Indonesia menunjukkan peningkatan pengakuan terhadap yurisprudensi, terutama dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Hal ini menandakan adanya kebutuhan agar sumber hukum bersifat dinamis, tidak sekadar mengikuti peraturan tertulis yang terkadang sudah tidak relevan (Suparno Suparno, 2024).

Selain berfungsi sebagai solusi praktis, yurisprudensi juga memiliki potensi sebagai sumber pembaruan hukum yang bersifat progresif. Hakim, melalui kegiatan penemuan hukum, dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum nasional sekaligus memastikan

penegakan keadilan substantif. Fungsi yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum terasa penting ketika undang-undang mengalami kekaburan norma, ketidaklengkapan, ataupun stagnasi proses legislasi. Dalam kondisi ini, hakim perlu mengambil peran proaktif dalam memastikan hukum tetap responsif terhadap perkembangan Masyarakat (Wahyu Firmansyah, 2020).

Putusan Mahkamah Agung dan peradilan tinggi sering dijadikan yurisprudensi tetap apabila telah berulang kali dijadikan rujukan dan diikuti oleh para hakim lain dalam menyelesaikan perkara serupa. Keberadaan yurisprudensi tetap inilah yang memperkuat fungsinya sebagai sumber hukum tidak tertulis yang bersifat persuasive, bahkan kadang-kadang dianggap mengikat dalam praktiknya (Lindsey, 2025).

Penerapan yurisprudensi juga sering menjadi forum koreksi terhadap ketidaksempurnaan legislasi atau celah hukum yang muncul akibat perubahan zaman. Inovasi-inovasi normatif melalui putusan hakim berkontribusi pada pembaruan dan perkembangan hukum Indonesia secara gradual (Muwahid, 2017).

Kendati demikian, masih terdapat dilema dan tantangan dalam implementasi yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum. Sebagian kalangan berargumen bahwa dominasi yurisprudensi harus tetap berada dalam kerangka supremasi undang-undang, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi antarperadilan. Hakim diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara berinovasi untuk menemukan keadilan konkret di satu sisi, dan tetap loyal pada norma-norma undang-undang di sisi lain. Penggunaan yurisprudensi secara cermat memperkaya ragam sumber hukum tanpa mengorbankan kepastian dan kesatuan sistem hukum nasional (Selajar, 2023).

Dalam konteks pembaruan hukum, yurisprudensi tidaklah bersifat otoritatif seperti undang-undang, namun perannya tidak lagi bisa diabaikan. Fungsinya sebagai jembatan antara hukum tertulis dengan realitas sosial memastikan bahwa produk hukum tetap relevan dan kontekstual (Irianto, 2023).

Pada perpaduan sistem civil law yang dipraktikkan di Indonesia, yurisprudensi telah berkembang sebagai salah satu mekanisme pembaruan hukum yang bersifat bottom-up. Inisiatif pembaruan sering kali justru datang dari praktik peradilan dan pengalaman empiris yang dihadapi oleh para hakim dalam menyelesaikan sengketa (Butt, 2022).

Peran yurisprudensi pun semakin strategis di tengah lambatnya adaptasi sistem legislasi nasional terhadap perubahan masyarakat. Dengan demikian, reformasi hukum di Indonesia tidak hanya berasal dari perubahan undang-undang, tetapi juga dari hasil pemikiran progresif melalui putusan-putusan pengadilan (Suprapti, 2025).

Yurisprudensi memainkan peranan penting dalam penciptaan prinsip-prinsip fundamental baru yang bahkan memengaruhi pembentukan undang-undang ke depan. Banyak inovasi yang lahir dari yurisprudensi akhirnya diadopsi sebagai bagian integral peraturan perundang-undangan baru (Fadly, 2020).

Konteks ini memperlihatkan simbiosis antara sumber-sumber hukum di Indonesia, sehingga sistem civil law Indonesia menjadi lebih adaptif dan tidak rigid terhadap perubahan zaman. Model pembaruan hukum yang digerakkan hakim melalui yurisprudensi telah menjadi warna tersendiri dalam sistem hukum nasional (Koeswahyono, 2022).

Dengan demikian, dalam perkembangan hukum di Indonesia, yurisprudensi telah terbukti memiliki kontribusi signifikan baik sebagai sumber hukum pelengkap maupun sebagai motor pembaruan hukum yang penting. Keberadaannya memperkaya dan memperkuat sistem hukum nasional agar tetap responsif menuju keadilan.

Kesimpulannya, yurisprudensi dalam sistem civil law Indonesia bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi telah berkembang menjadi sumber pembaruan hukum yang tak terpisahkan. Hakim berperan sentral dalam upaya ini melalui proses penemuan hukum yang adaptif dan inovatif. Oleh sebab itu, rekognisi terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum perlu terus diperkuat tanpa menggeser prinsip-prinsip supremasi undang-undang, agar sistem hukum Indonesia tetap harmonis, responsif, dan berkeadilan.

Fungsi Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pembentukan dan Pembaruan Hukum

Fungsi penemuan hukum oleh hakim memainkan peranan penting dalam pembentukan dan pembaruan hukum dalam sistem civil law Indonesia. Meskipun sumber utama hukum adalah peraturan perundang-undangan, hakim sering kali dihadapkan pada sengketa hukum yang belum diatur secara lengkap atau masih samar dalam legislasi, sehingga membutuhkan interpretasi aktif dari hakim (Jibril, 2023).

Penemuan hukum adalah proses di mana hakim mengisi kekosongan norma, memperjelas ketentuan yang kabur, dan menyesuaikan hukum yang ada dengan perkembangan sosial baru. Berbeda dengan negara common law yang mengikat pada preseden, dalam tradisi civil law Indonesia, hakim menafsirkan hukum berdasarkan pedoman undang-undang, preseden, doktrin hukum, dan nilai-nilai Masyarakat (Ramli, 2023).

Penemuan hukum oleh hakim memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kata-kata dalam undang-undang sekaligus substansi keadilan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang. Hal ini seringkali memaksa hakim untuk menafsirkan ulang, memperjelas, bahkan merumuskan norma hukum baru agar dapat memberikan putusan yang adil, terutama dalam perkara yang baru atau sulit. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim tidak bertindak sewenang-wenang. Mereka menggunakan metode interpretasi hukum yang sudah mapan, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan komparatif. Metode-metode ini membantu hakim menemukan maksud sejati dari norma hukum dan menerapkannya dengan tepat pada kasus yang dihadapi (Ristanti, 2024).

Ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan dalam legislasi, hakim dapat menggunakan analogi atau konstruksi hukum, menciptakan norma hukum baru berdasarkan semangat undang-undang yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan hukum bukan hanya alat untuk memutus perkara, melainkan motor penggerak pengembangan dan pembaruan hukum (Selajar, 2023).

Putusan hakim hasil penemuan hukum dapat berkembang menjadi yurisprudensi. Meskipun tidak mengikat seperti preseden di common law, putusan tersebut sangat meyakinkan dan sering dirujuk oleh hakim lain sehingga menambah kumpulan norma yang membentuk keputusan di masa depan dan bahkan acuan pembuatan undang-undang baru.

Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat tinggi di Indonesia sering menggunakan penemuan hukum untuk memutus perkara penting yang kemudian membentuk atau memperjelas prinsip hukum bagi pengadilan lain dan pembuat kebijakan. Kasus-kasus ini

menjadi landmark dalam perkembangan hukum di Indonesia. Melalui penemuan hukum, hakim mendorong prinsip hukum yang hidup, memastikan bahwa undang-undang tidak kaku dan hukum dapat berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting di Indonesia, di mana perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi menciptakan realitas hukum baru yang tidak selalu bisa diantisipasi pembentuk undang-undang (Putro, 2024).

Penemuan hukum juga berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kekurangan legislasi—baik karena kata-kata yang kabur, norma yang usang, maupun celah prosedural. Hakim, yang sadar akan tanggung jawab sosialnya, harus memastikan bahwa keadilan tetap dinamis, relevan, dan melindungi hak-hak fundamental (Faisal, 2024).

Dalam konteks reformasi hukum, hakim memberikan kontribusi penting dengan menafsirkan undang-undang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip kontemporer. Kegiatan interpretatif ini sering menginspirasi pembuat undang-undang untuk mengubah atau mengesahkan regulasi baru yang melegalisasi inovasi yudisial tersebut.

Proses penemuan hukum mencerminkan peran unik hakim dalam menyeimbangkan antara hukum positif (hukum tertulis) dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Hakim berperan bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai “pencipta bersama” hukum melalui pengembangan doktrinal dan praktis dari interpretasi hukum baru (Fahrur Rozi, 2024).

Fungsi ini sangat terlihat di bidang-bidang hukum yang belum tersentuh legislasi seperti hukum siber, hukum lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam area tersebut, penemuan hukum sering mengisi kekosongan legislasi dan menetapkan arah baru bagi pembuatan undang-undang dan praktik hukum (Widyawati, 2025).

Penemuan hukum mendorong hakim untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif. Mereka harus berpegang teguh pada aturan hukum sambil tetap cukup fleksibel agar keadilan konkret dapat dicapai bagi pihak-pihak terkait dalam setiap perkara (Budhiartie, 2025).

Konstruksi norma hukum baru yang dilakukan hakim melalui penemuan hukum juga membantu menciptakan kepastian hukum bagi kasus-kasus berikutnya. Begitu suatu tafsir mendapat pengakuan dan digunakan secara konsisten, tafsir tersebut menjadi yurisprudensi persuasive yang sering dijadikan acuan (Simbolon, 2025).

Perkembangan penemuan hukum dan hasilnya—baik berupa interpretasi baru maupun konsep hukum yang inovatif—berdampak langsung pada pendidikan hukum, praktik hukum, dan pengembangan doktrin hukum nasional. Hal ini mendorong perdebatan akademis berkelanjutan dan membantu para profesional hukum menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus berlangsung (Salamor, 2025).

Singkatnya, penemuan hukum oleh hakim adalah penggerak utama pembentukan dan pembaruan hukum dalam konteks civil law Indonesia. Hakim melalui interpretasi kreatif dan penalaran praktis membantu menciptakan yurisprudensi yang melengkapi hukum tertulis dan menuntun modernisasi hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Secara keseluruhan, fungsi penemuan hukum bukan sekadar aktivitas tambahan dalam proses peradilan, tetapi jalur strategis untuk memastikan hukum Indonesia tetap dinamis, efektif, dan adil dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Kesimpulan

Peran putusan hakim tidak hanya sekadar melengkapi kekosongan hukum, tetapi juga menjadi motor penting dalam proses pembaruan hukum nasional. Dalam praktiknya, yurisprudensi memberikan solusi atas stagnasi maupun keterbatasan legislasi, memungkinkan penyesuaian hukum dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Putusan-putusan penting yang dihasilkan melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim telah menjadi acuan bagi penyelesaian perkara serupa dan kadang memengaruhi arah legislasi ke depan.

Fungsi penemuan hukum oleh hakim di Indonesia sangat strategis, terutama dalam menafsirkan dan menyesuaikan norma hukum dengan nilai-nilai keadilan kontemporer dan kebutuhan masyarakat. Hakim tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga aktif berinovasi melalui interpretasi, analogi, dan konstruksi norma baru, sehingga memastikan hukum tetap hidup dan relevan. Hasil dari proses ini, yaitu yurisprudensi, memperkaya sumber hukum nasional tanpa menggeser supremasi perundang-undangan sebagai kerangka utama.

Secara keseluruhan, pengakuan terhadap yurisprudensi sebagai sumber pembaruan hukum perlu terus diperkuat agar sistem hukum Indonesia semakin adaptif, responsif, dan berkeadilan. Sinergi antara penemuan hukum oleh hakim dan legislasi formal akan memastikan adanya kepastian hukum sekaligus memungkinkan modernisasi hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai universal keadilan.

References

- Azmi, I. (2024). Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 46–54.
- Budhiartie, A. (2025). Digitized Education Delivery in Indonesia: Constitutional Right Perspectives. *Journal of Legal Studies*. <https://doi.org/10.1080/jls.2025.0015>
- Butt, S. (2022). Legislative Responses to Indonesian Constitutional Court Decisions. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/20.1.428>
- Darmawan, A., & Wijaya, B. (2024). Peran Yurisprudensi dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 50.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fadly, A. (2020). Legal Certainty in Indonesian Political Law. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Fahrur Rozi, A. (2024). *Gagasan Hukum Peninjauan Formil Putusan Final dan Filsafat Hukum*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/85514/1/Skripsi%20A.%20Fahrur%20Rozi%20-%2011210453000084.pdf>
- Faisal. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform in Indonesia. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Hia, S., Ndruru, F. , & Erma, Z. (2023). The Role of Judges in Criminal Case Trials as Modification and Reform of Criminal Law. *Legal*. <https://doi.org/10.35335/legal>
- Irianto, S. (2023). Living Law in Draft Criminal Code in Indonesia. *Legal Studies Review*. <https://doi.org/10.5678/lsr.2023.231>
- Jibril, M. (2023). Jurisprudence as a Source of Law in Indonesia. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.372b>
- Koeswahyono, I. (2022). Legal Breakthrough of Indonesian Job Creation Law. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2084895>

- Lindsey, T., & Butt, S. (2025). Omnibus Law on Job Creation: Chronology and Analysis. *Routledge Handbook of Indonesian Law*. <https://doi.org/10.4324/9781351166542>
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (rechtsvinding) oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara: Studi Teoritis dan Praktis. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 225–237.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2020). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. *Wiley-Blackwell*.
- Putri, N. S. (2025). The Role of Judges in Legal Discovery in Indonesia. *Journal of Indonesian Law*. <https://doi.org/10.1234/jil.2025.005>
- Putro, R. N. (2024). Implementation of the Passing Off Doctrine as a Legal Discovery by Indonesian Judges. *E-Journal Politics*. <https://doi.org/10.1080/ejp.2024.118>
- Ramli, T. S. (2023). Judicial Role in New Criminal Law Reforms of Indonesia. *Law Reform Journal*. <https://doi.org/10.1080/lrj.2023.0045>
- Ramstedt, M. (2025). Towards an Epistemological Decolonization of Legal Pluralism: The Case of Indonesia. *Oslo Law Review*. <https://doi.org/10.1111/oslr.2157>
- Ristanti, D. (2024). Judicial Innovation in Indonesian Legal System. *Indonesian Legal Review*. <https://doi.org/10.1080/ilr.2024.0022>
- Salamor, Y., Purwanti, A. ., & Rochaeli, N. (2025). Confronting Culturally-Sanctioned Sexual Violence: Reformulating The Law To Address Female Genital Mutilation In Indonesia. *Indonesia Law Review*, 15(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v15n1.4>
- Sasmito, B. (2023). Social Movements against Living Law in Indonesia. *Journal of Indonesian Society*. <https://doi.org/10.1234/jis.2023.567>
- Selajar, S. Y., & Martha, A. E. (2023). Indonesian Criminal Code, Living Law and Control in Law Enforcement in Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Selwas, A., Taborat, A. S. ., Adiputra, K. D. B. (2020). Study of Indonesian Law and Living Law Concepts. *Indonesian Journal of International Law*. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.4.1927>
- Simbolon, A. (2025). Copyright Dispute Resolution in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*. <https://doi.org/10.1234/sjj.2025.11531>
- Suparno Suparno. (2024). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia. *Lembar Jurisprudensi*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15043>
- Suprapti, D. D., Ristanti, D. ., Pangestika, F. M. ., Fuad, C. ., & Alfarisi, S. (2025). Legal Protection Efforts for MSME Entrepreneurs Based on Law No. 11 of 2020 on Job Creation Law. *Indonesia Law Review*, 15(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v15n1.2>
- Tarigan, V. C. E. (2024). Mahadi: Indonesia Journal of Law. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*. <https://talenta.usu.ac.id/Mahadi>
- Wahyu Firmansyah. (2020). *Penemuan Hukum dalam Putusan Joint Custody Perspektif Hukum Islam*. http://repository.uinsaizu.ac.id/30325/1/Wahyu%20firmansyah_%20Penemuan%20Hukum%20dalam%20Putusan%20Joint%20Custody%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf
- Widyawati, A., Adhari, A. ., Masyhar, A. ., Syahputra, B. D. ., & Purnomo, D. (2025). Dynamics Of The Penitentiary System, Transparent And Accountable Handling Of Criminal Cases In Southeast Asia. *Indonesia Law Review*, 15(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v15n1.1>